



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**UNIT KERJA** : RSJ MENUR SURABAYA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RIFATUL HASNA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 844847

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 272.328.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 103.47 m<sup>2</sup>/100 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 272.328.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 857.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 28J Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU F65ORV GMDFJ 4X2 MT Tahun 2012, HIBAH TANPA AKTA Rp. 60.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV RE1 2.4 2WD AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOBIL, BMW F30 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 545.000.000
5. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 17.266.480

**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. 33.579

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 169.006.030

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 1.315.634.089

**III. HUTANG** Rp. 860.619.598

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 455.014.491

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.